

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Perkembangan perkotaan ke arah pinggiran kota mendorong para pengembang perumahan mengembangkan usahanya untuk penyediaan hunian. Hunian tersebut didirikan dengan kerjasama para pengusaha atau pengembang. Penyediaan hunian untuk daerah perumahan masih kurang akses dalam prasarana pengelolaan persampahan. Khususnya terjadi pada kawasan perumahan skala kecil, para pengembang perumahan ini seringkali tidak menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk suatu perumahan. Salah satunya juga adalah prasarana pengelolaan persampahan, sehingga untuk melengkapi kekurangan yang ada dibutuhkan pihak ketiga atau pihak luar dalam pemenuhan pengelolaan persampahannya.

Kondisi sosial-ekonomi dari perumahan skal kecil di Kelurahan Meteseh untuk tingkat usia berada pada usia produktif yaitu rentang umur antara 17-50 tahun. Dengan tingkat pendidikan terakhir rata-rata untuk perumahan Puri Cempaka Asri dan Graha Mulia Asri I berada pada tingkatan lulusan sarjana, sedangkan untuk perumahan Durenan Asri dan Graha Mulia Asri III lulusan SMA. Keempat perumahan ini rata-rata jenis pekerjaannya adalah pegawai swasta dan pegawai negeri sipil yang berarti berupa pegawai kantoran dengan penghasilan mulai dari Rp 1.000.001-Rp 3.000.000. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada peran dalam persampahan menjadi berkurang karena umumnya pegawai tidak memiliki banyak waktu terkait mengelola sampahnya sendiri sehingga membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan persampahan di perumahannya.

Bila dilihat pada pelaksanaan teknis operasional masih terdapat perumahan yang memiliki tingkat inefisien dari segi pewardahan yaitu untuk perumahan Puri Cempaka Asri dan Durenan Asri. Inefisiensi pewardahan pada kedua perumahan tersebut juga ditunjukkan dengan kekuatan bahan wadah sampah yang ada masih dikategorikan lemah atau mudah hancur. Sehingga untuk kondisi pewardahan kedua perumahan tersebut bisa dikategorikan buruk. Berbeda dengan perumahan Graha Mulia Asri I dan Perumahan Graha Mulia Asri III yang memiliki kondisi sistem pewardahan yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan persepsi penghuni yang mengatakan efisien dan cukup efisien dari segi efisiensi pewardahan, kemudian juga didukung dengan kekuatan pewardahan yang cukup kuat untuk menampung sampah yang ada di perumahan tersebut.

Pada sistem pengumpulan pada perumahan Durenan Asri sendiri memiliki persepsi penghuni untuk diadakan perbaikan sistem dikarenakan frekuensi pengumpulan yang kurang baik dan terlambat sehingga menjadi permasalahan. Sedangkan ketiga perumahan lainnya memilih sistem

pengumpulan sudah cukup baik. Sedangkan retribusi yang dibayar ke pihak luar sudah tidak terdapat permasalahan karena sudah cukup terjangkau bagi seluruh perumahan walaupun di tiap perumahan masih ada yang berbeda besar retribusinya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya penghuni yang tidak membayar penuh untuk retribusi sampah sehingga subsidi silang terjadi bagi penghuni yang bersedia membayar lebih untuk operasional pihak luar dalam pelaksanaan pengumpulan sampahnya. Akan tetapi, untuk peran serta penghuni perumahan terhadap keinginan dalam penentuan retribusi masih kurang sehingga muncul suatu indikasi bahwa tidak adanya ketetapan pembayaran retribusi yang kemudian penghuni masih membayar dengan tidak sesuai ketetapan.

Keinginan penghuni dalam menentukan retribusi juga seharusnya dibutuhkan suatu organisasi atau paguyuban di dalam perumahan karena pada tempat itu media yang tepat untuk bersama menetapkan suatu ketetapan, hal tersebut terjadi di perumahan Graha Mulia Asri III. Perumahan ini sebagian besar memiliki persepsi dalam menentukan retribusi pada tingkat ingin ikut andil dalam penentuannya dan tentunya bersama dengan pengelola persampahan dari pihak luar tersebut. Selain peran penghuni di dalam penentuan tarif retribusi, juga dilihat kontribusinya pada pengelolaan sampah 3R. Pada semua perumahan setuju ingin ikut berkontribusi di dalam pengelolaan sampah seperti ini berupa pengomposan dan daur ulang kembali sampah plastik yang dikerjakan masuk ke dalam agenda organisasi di dalam maupun di luar perumahan.

Kemudian penilaian tingkat kepuasan yang berasal dari masing-masing penghuni perumahan berbeda-beda. Pada perumahan Puri Cempaka Asri dan Perumahan Graha Mulia Asri I mengatakan bahwa mereka memilih tingkatan yang sangat puas dengan pengelolaan sekarang yang ada. Sedangkan pada perumahan Durenan Asri dan Graha Mulia Asri III para penghuni mengatakan hanya pada tingkatan cukup puas. Dengan kepuasan yang telah diambil dari persepsi penghuni maka dapat dipastikan sistem yang sudah berjalan seperti ini ingin dilanjutkan. Alasan yang cukup jelas untuk melanjutkan sistem seperti ini adalah dikarenakan memang tidak terdapat pilihan atau opsi lain dalam hal pengelolaan sampahnya jika tidak melibatkan pihak luar. Walaupun dari segi pewadahan pada sebagian perumahan masih ada yang merasa tidak layak, sehingga membutuhkan peran bantuan pihak luar. Kemudian juga jika dilihat dari pengumpulannya tentu saja akan merepotkan bila mengurus secara individu. Jika pengelolaan dari pihak luar ini tidak ada maka dapat dipastikan lingkungan perumahan akan tercemar oleh sampah dan perumahan tersebut tidak dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi untuk pemerintah**

Perkembangan perumahan skala kecil tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pendukungnya. Salah satu contohnya ada pengelolaan persampahan, dalam

pelaksanaannya pihak luar menjadi pilihan terakhir bagi para penghuni perumahan untuk mengurangi masalah persampahan yang ada. Hal tersebut mengindikasikan peran pemerintah masih dirasa belum optimal, sedangkan secara utuh dan nyata seluruh sarana dan prasarana yang berkaitan dilakukan dengan secara maksimal. Peran pemerintah dalam hal persampahan juga dapat berupa pelaksana atau juga bisa berupa sebagai pengontrol sehingga peran pemerintah bisa diatur dengan optimal. Tugas yang dilaksanakan oleh para pengelola persampahan yang berasal dari luar perumahan harus diawasi dengan baik dan juga selalu memperbaiki keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi atau memodernisasi metode yang sudah ada.

Peraturan ataupun ketentuan hukum secara ketat harus dibuat dan juga diterapkan agar antara penyedia jasa dan penerima jasa dalam hal ini adalah penghuni perumahan memiliki pedoman bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan berdampak agar mengurangi pembuatan peraturan yang terkesan sepihak saja. Kemudian juga pemerintah seharusnya lebih melibatkan masyarakat atau penghuni sautu perumahan dalam usaha pengurangan sampah melalui metode 3R. Hal tersebut akan sangat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan juga sesuai dengan prinsip pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

### **5.2.2 Rekomendasi untuk Masyarakat**

Pelaksanaan pengelolaan persampahan yang dilakukan akan menemui suatu kegagalan apabila tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Pada kondisi yang ada masyarakat sudah mencapai tingkat kepuasan yang cukup oleh keadaan pengelolaan persampahan yang ada. Hal tersebut tidaklah cukup untuk mengajak masyarakat dalam membangun pemikiran bahwa sebenarnya sampah masih bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang masih minim menyebabkan pengelolaan persampahan terkesan kurang berkelanjutan. Masyarakat harus jauh lebih terlibat dalam hal diluar teknis operasional seperti pembiayaan dan pengelolaan sampah kembali agar optimalisasi sektor persampahan bisa maksimal.